

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA
PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Meperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH :

NAMA : SELVIANA
NPM : 1405170646
JURUSAN : AKUNTASI KEUANGAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : SELVIANA
NPM : 1405170646
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL I MEDAN
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I


(IDA ASTUTY, SE, M.Si, Ak, CIA, CA, CPAI)

Penguji II


(H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM, CA)

Pembimbing


(SEPRIDA HANUM HARAHAT, SE, SS, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris


(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SELVIANA
N.P.M : 1405170646
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DALAM MENINGKATKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUM
PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

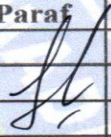
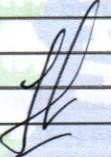
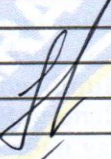
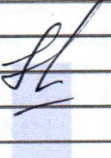
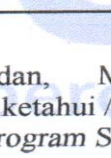
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



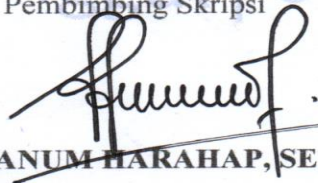
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SELVIANA
 N.P.M : 1405170646
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
 Judul Skripsi : ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DALAM MENINGKATKAN
 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PERUM
 PERUMNAS REGIONAL I MEDAN

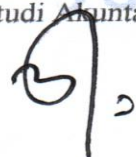
Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/3/2019	- Perbaiki BAB IV - Lihat format - Servaikan lagi dan lihat bab I, II, III		
6/3/2019	Perbaiki Deskripsi data Perbaiki analisa data		
7/3/2019	Perbaiki hasil penelitian dan pembahasan		
11/3/2019	- Perbaiki kesimpulan dan saran - daftar pustaka - abstrak, kata pengantar - daftar isi, tabel, gambar		
14/3/2019	Selesai bimbingan Ace		

Pembimbing Skripsi



SEPRIDA HANUM HARAHAP, SE, SS, M.Si

Medan, Maret 2019
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selviana
NPM : 1405170646
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DALAM
MENINGKATKAN *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE (GCG) PADA PERUM PERUMNAS
REGIONAL 1 MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PERUM PERUMNAS REGIONAL 1 MEDAN.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
8B5A7AFF001964329
6000
ENAM RIBU RUPIAH
SELVIANA

ABSTRAK

SELVIANA. NPM. 1405170646. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Perum Perumnas Regional I Medan, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor penyebab rendah dan turunnya Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas yang terdiri dari *cash ratio*, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan GCG dan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan Rasio Likuiditas yang terdiri dari *cash ratio*, *current ratio* pada Perum Perumnas Regional I Medan.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Perum Perumnas Regional I Medan berupa laporan laba rugi dan neraca sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Cash Ratio* belum memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 35%. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik bagi perusahaan disebabkan menurunnya kas perusahaan dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan. Berarti perusahaan belum mampu dalam membayar hutang jangka pendek atau hutang yang telah jatuh tempo dengan menggunakan kas perusahaan. Hal ini juga disebabkan karena perusahaan kurang maksimal dalam pengelolaan asset yang tertanam dalam bentuk kas yang dimiliki. GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Perum Perumnas Regional I Medan dapat membuktikan informasi mengenai kinerja perusahaan sebagian yang diukur dengan rasio likuiditas yaitu *current ratio* sudah berada diatas standart BUMN yaitu 125% akan tetapi *cash ratio* masih berada dibawah standart BUMN yaitu 35%. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa skor Good Corporate Governance yang meningkat belum mampu meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas Perum Perumnas Regional 1 Medan. Dilihat dari hasil perhitungan cash ratio masih berada dibawah standart BUMN.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance dan Current Ratio, Cash Ratio*

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamina puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Perum Perumnas Regional I Medan.”**

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan Skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. ALLAH SWT, atas berkah dan rahmat yang diberikan-Nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Untuk yang terkhusus, Ayahanda Ahmad dan Ibunda Sariyah tercinta yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang yang sangat luar biasa yang selalu memberi arahan, dukungan, semangat motivasi serta saran yang mendukung kepada penulis. Dan terima kasih kepada Abang penulis Agus Solihin A.Md Kom beserta Kakak Ipar penulis Fitri Kumala Sari dan juga Adik Penulis Irmayani Syahputri yang selalu memberikan semangat, saran serta motivasi untuk penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Seprida Hanum Harahap, S.E. S.S M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan Skripsi.

10. Ibu Dahrani, SE., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
11. Bapak Syaiful selaku karyawan di Perum Perumnas Regional I yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
12. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Kepada Sepupu penulis Dewi Sinta Saputri yang selalu memberikan do'a, dukungan, arahan semangat serta motivasi yang mendukung penulis.
14. Kepada anggota FARSTAR yakni Fahnur Anggraini Sigalingging S.Ak, Anggi Mentari Hasibuan S.Ak, dan Ristia Anzhani S.Ak serta Fitri Rahayu Ulandari br. Manurung S.Ak sekaligus teman bimbingan Nurainun Harahap S.Ak dan Nasiatun Hikmah Dalimunthe S.Ak yang telah memberikan dorongan semangat serta saran dan motivasi yang mendukung kepada Penulis.
15. Teman-teman seperjuangan stambuk 2014 jurusan Akuntansi terkhususnya untuk kelas G Akuntansi Pagi yang telah memberikan saran dan motivasi kepada Penulis.
16. Teman-teman SMA Diah Sri Utami S.Sos, Dian Nanda Utama S.Ak, Nike Yulia Artiwi Lubis S.E, Putri Ayu Bali S.Ak dan Putri Cahyati yang telah memberikan semangat saran serta motivasi kepada penulis.
17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alah SWT membalas kebaikan kalian semua.
Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka Skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan do'a dan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap Skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

SELVIANA
1405170646

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	12
1. Kinerja Keuangan.....	12
a. Pengertian Kinerja Keuangan.....	12
b. Jenis-jenis Rasio Keuangan.....	14
2. Good Corporate Governance.....	18
a. Pengertian dan Konsep Dasar <i>Good Corporate Governance</i> ..	18
b. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	20
c. Prinsip-prinsip GCG.....	23
d. Faktor-faktor Keberhasilan Penerapan GCG	27
e. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-prinsip GCG.....	28
f. Organ Persero.....	28
g. Komite Penunjang Dewan Komisaris	33
h. Sekretaris Perusahaan	35
i. Pengukuran Terhadap GCG	36
3. Penelitian Terdahulu	37
B. Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Definisi Operasional Variabel	42
C. Tempat dan Waktu Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	47
1. Deskripsi Data.....	47

2. Analisis Data	48
3. Perhitungan <i>Good Corporate Governance</i>	54
B. Pembahasan.....	56
1. Menganalisis Penyebab menurunnya Kinerja Keuangan yang diukur dengan Cash Ratio Perum Perumnas Regional 1 Medan.....	56
2. Menganalisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Perum Perumnas Regional 1 Medan	58
3. Menganalisis GCG dalam meningkatkan Rasio Likuiditas pada Perum Perumnas Regional 1 Medan.....	61
4. Wawancara pada Perum Perumnas Regional 1 Medan.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Tabulasi Skor <i>Good Corporate Governance</i> dan Rasio Likuiditas Perum Perumnas Regional I Medan.....	6
Tabel II.1 Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Standart Kementerian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002	17
Tabel II.2 Penilaian Skor GCG Berdasarkan Keputusan Sekertaris Kementerian BUMN NO : SK-16/S.MBU/2012	37
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel III.1 Indikator Wawancara GCG.....	43
Tabel III.2 Indikator Wawancara Kinerja Keuangan.....	43
Tabel III.3 Waktu Penelitian	44
Tabel III.4 Daftar Wawancara Perum Perumnas Regional 1 Medan.....	45
Tabel IV.1 Perhitungan <i>Current Ratio</i> Perum Perumnas Regional I Medan...	49
Tabel IV. 2 Perhitungan <i>Cash Ratio</i> Perum Perumnas Regional I Medan	52
Tabel IV.3 Penilaian Skor Indeks GCG Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN	55
Tabel IV.4 Hasil Skor <i>Good Corporate Governance</i> Perum Perumnas Regional I Medan Selama tahun 2013-2017.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir Penelitian	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan perekonomian Indonesia yang sedang dilanda krisis berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha baik perusahaan swasta maupun BUMN yang mengalami *failed*, dikarenakan tidak mampu lagi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, salah satu penyebab terjadinya peningkatan harga produk dan terjadinya penurunan daya beli konsumen. Sedangkan tujuan daripada perusahaan pada umumnya adalah memperoleh laba, sedangkan tujuan untuk memperoleh laba perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya, maka hal tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas baik kualitas jasa maupun kualitas produk.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

“Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu dan

tertuang dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.” (Anggita Sari dan Musmainah, 2012).

Kinerja perusahaan yang baik, stabil dan cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh para investor. Sedangkan perusahaan yang memiliki kinerja buruk, tidak stabil serta *profit* yang cenderung menurun tidak akan dilirik oleh investor (Nugroho, 2014).

Laporan keuangan merupakan sumber informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Data keuangan perusahaan tersebut dianalisis lebih lanjut sehingga akan diperoleh informasi yang dapat mendukung keputusan yang dibuat. Laporan keuangan ini harus menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah ditetapkan prosedurnya sehingga laporan keuangan dapat diperbandingkan agar tingkat akurasi analisis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui kinerja Perum Perumnas Regional I Medan maka perusahaan perlu melakukan analisis laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan analisa terhadap pos-pos neraca dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangan. Sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan. Efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh profitabilitas dan aktivitas dalam perusahaan. Dengan demikian penggunaan

analisis rasio keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan yang telah dicapai. Untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan usaha maka perusahaan perlu menganalisis laporan keuangan agar dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan organisasi adalah dengan cara menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan dan pengolahan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menentukan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Selain itu juga mewujudkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan tertutup harus memandang *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sebagai publik maupun aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003).

“Secara teoritis praktik GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.” (Diah Kusuma, 2008 : 16).

Menurut I Nyoman Tjager (2003-2008), menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik. Krisis pada tahun 1997 di Indonesia disertai dengan buruknya implementasi tata kelola pemerintahan menjadikan perekonomian Indonesia terpuruk. Maka kesadaran

terhadap tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta harus dimulai dan di implementasikan. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* terlebih khusus prinsip-prinsipnya yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* (TARIF) menjadi suatu *issue* yang mengemuka untuk diperbincangkan, dan merupakan alat atau pelaksana tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi prinsip-prinsip GCG memberikan implikasi positif bagi setiap perusahaan dan pemerintah. Kinerja hingga prestasi yang mengagumkan dan membanggakan dapat diraih atau dicapai baik secara Nasional dan hingga pada taraf Internasional.

Kesadaran dan keseriusan terhadap upaya pemerataan implementasi prinsip-prinsip GCG di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Pembuatan serta dengan mengeluarkan peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip GCG adalah solusi yang bersifat mengikat dan memaksa (*regulatory driven*) bagi setiap perusahaan berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT), baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta. Peraturan atau regulasi tersebut, antara lain adalah Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pada awal tahun 2008, jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah pembinaan Kementrian BUMN adalah sebanyak 140 BUMN dengan total *aset* lebih dari Rp 1.400 triliun dan bergerak di hampir seluruh bidang perekonomian. Sayangnya, kinerja BUMN secara keseluruhan belum begitu menggembirakan. Bahkan, masih terdapat beberapa BUMN yang

menderita kerugian berlarut-larut sehingga akhirnya turut membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Mengingat BUMN memegang peranan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Pada saat ini prinsip GCG belum sepenuhnya dilingkungan BUMN.

Bahkan masih terdapat beberapa BUMN yang belum memiliki kebijakan operasional tentang penerapan GCG. Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor BUMN, maka pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan peraturan secara khusus mengatur mengenai dasar penerapan GCG bagi perusahaan BUMN melalui keputusan menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN yang kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Bada Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi GCG berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan pada suatu perusahaan, maka perusahaan perlu memiliki alat bantu guna dapat mengukur tingkat keuangan. Dalam hal ini penulis ingin melihat perusahaan ini baik dan sehat atau tidaknya dilihat dari Skor GCG yang telah dicapai dari indikator kepemimpinan, tata kelola dan tanggung jawab kemasyarakatan. Serta dibandingkan dengan melihat kinerja keuangan perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan analisis rasio keuangan dengan alat perhitungan atau analisis rasio likuiditas berdasarkan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002. Dari

perbandingan Skor GCG dan Kinerja Keuangan Perum Perumnas Regional 1 Medan dalam lima tahun terhitung mulai 2013-2017 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.1
Tabulasi Skor GCG dan Rasio Likuiditas
Perum Perumnas Regional I Medan

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	Standart BUMN
Good Corporate Governance						
Skor GCG	83,35%	81,52%	88,52%	84,62%	86,46%	>60%
Rasio Likuiditas						
Cash Ratio	24,12%	23,52%	97,69%	3,29%	3,86%	>35%
Current Ratio	249,11%	243,69%	450,26%	335,30%	317,99%	>125%

Sumber : Laporan Keuangan Perum Perumnas Regional I Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa skor *Good Coporate Governance* (GCG) untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dikategorikan dengan predikat sangat baik, hal ini tidak diikuti dengan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas pada Perum Perumnas Regional I Medan masih ada yang mengalami penurunan, untuk kinerja keuangan yang diukur dengan *Cash Ratio* untuk setiap tahunnya dan hanya meningkat pada tahun 2015 dan untuk tahun selanjutnya tetap mengalami penurunan dan masih berada di bawah standar BUMN, dan untuk kinerja keuangan yang diukur dengan *Current Ratio*, mengalami penurunan dan peningkatan akan tetapi masih berada di atas Standart BUMN berdasarkan No : KEP-100/MBU-2002. Pemenuhan kewajiban jangka pendek yang dilakukan perusahaan dapat memberikan suatu bentuk atau gambaran sistem pengelolaan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menjaga likuiditas perusahaan dengan mengelola aktivitya dengan baik.

Laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009:3). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan antara lain Good Corporate Governance, karena dasar Good Corporate Governance pada dasarnya memiliki tujuan memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin baik Good Corporate Governance yang dimiliki perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Sedangkan yang terjadi Good Corporate Governance belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pada Perum Perumnas Regional 1 Medan (Dani dan Hasan, 2005).

Menurut Newel dan Wilson dalam artikelnya yang berjudul "*A Premium for Good Corporate Governance*" yang dikutip oleh Tjager et al (2003) dalam Arifin (2005) bahwa secara teoritis praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko merugikan akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sedangkan yang terjadi GCG belum mampu meningkatkan kinerja keuangan pada Perum Perumnas Regional I Medan.

Rasio kas merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar dengan kata lain *Cash Ratio* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar tahun yang bersangkutan. Penurunan kas terjadi karena menurunnya ketersediaan uang kas yang dimiliki perusahaan. Penilaian terhadap kas

mengalami penurunan dan masih berada dibawah Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar 35%.

“Semakin kecil rasio ini semakin jelek bagi perusahaan, demikian pula sebaliknya”. (Kasmir, 2015).

Hasil penelitian terdahulu Wika Agustina Harahap (2016) menunjukkan bahwa *corporate governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan menunjukkan keadaan yang tidak sejalan, dimana skor GCG mengalami peningkatan belum tentu kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Dan Nadia Guchi (2016) yang menyatakan penerapan GCG untuk menilai kinerja perusahaan belum tentu dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan, terbukti dengan penilaian terhadap GCG yang diukur dengan perolehan skor yang meningkat tidak diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan.

Ristifany (2009) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan memiliki hubungan searah yang sangat kuat. Dan Ridwan Frediawan (2008) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan pada fenomena diatas, menunjukkan bahwa betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung pencapaian kinerja keuangan. Dalam kaitan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governane* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Perum Perumnas Regional I Medan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah mengenai analisis Good Corporate Governance dalam meningkatkan rasio likuiditas, yaitu :

1. Perum Perumnas Regional 1 Medan ditinjau dari skor GCG yang telah dihasilkan setiap tahunnya mengalami kenaikan dilihat dari indikator meliputi komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan, pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi Pengungkapan Informasi dan Implementasi, dan aspek lainnya.
2. Perum Perumnas Regional 1 Medan telah menerapkan GCG akan tetapi *Cash Ratio* mengalami penurunan tiap tahunnya dan masih berada di bawah standar BUMN yaitu 35% yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.
3. Perum Perumnas Regional 1 Medan telah menerapkan GCG dan *Current Ratio* mengalami penurunan dan peningkatan tiap tahunnya akan tetapi masih berada di atas standar BUMN yaitu 125% yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, dan dengan kemampuan juga keterbatasan waktu yang dimiliki maka dalam penelitian ini kinerja keuangan dibatasi pada rasio likuiditas yang terdiri dari rasio *Cash Ratio*, *Current Ratio* dan GCG

2. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor penyebab rendah dan turunnya kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas yang terdiri dari *Cash Ratio* Perum Perumnas Regional I Medan ?
- b. Bagaimana penerapan GCG pada Perum Perumnas Regional I Medan ?
- c. Bagaimana GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas yang terdiri dari *cash ratio* dan *current ratio*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab rendah dan turunnya Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas yang terdiri dari *cash ratio* Perum Perumnas Regional I Medan.
- b. Untuk menganalisis penerapan GCG pada Perum Perumnas Regional I Medan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari *cash ratio* dan *current ratio* Perum Perumnas Regional I Medan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

b. Bagi Investor

Membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dengan melihat penerapan GCG agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

c. Bagi perusahaan

Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan, dalam hal ini penerapan GCG dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berniat untuk mengembangkannya dalam taraf yang lebih lanjut dengan penelitian yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan secara maksimal yang dituangkan dalam laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan pada periode tertentu.

Istilah kinerja atau *performance* sering kali dikaitkan dengan kondisi keuangan perusahaan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah motivasi para karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Kinerja perusahaan adalah hasil banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen.

Kinerja keuangan adalah penentu ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam

menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya.

Ada beberapa pengertian analisis rasio ditemukan oleh beberapa ahli menurut Bambang Riyanto (2009 : 54) yang dikemukakan analisis rasio yaitu sebagai berikut : “Pengertian rasio disini sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam aritmatika *term* yang dapat digunakan untuk hubungan antara dua macam data *financial*.”

Menurut Sawir (2003 : 144), menyatakan bahwa :

“Dalam menilai kinerja keuangan yang menggunakan analisis rasio keuangan perlu diketahui standart rasio keuangan tersebut. Pengertian kinerja keuangan secara umum adalah suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang lain.”

Menurut Kasmir (2012 : 16), menyatakan bahwa :

“Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan.”

Menurut Munawir (2010 : 31) pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
- c. Untuk mengetahui tingkat efektivitas usaha.

b. Jenis Analisa Rasio Keuangan

1) Rasio Likuiditas

Menurut Munawir (2007 : 31) menyatakan likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

Jenis-jenis rasio likuiditas :

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan.

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.

2) Rasio Profitabilitas

Menurut Munawir (2007 : 33), rasio profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, dan dapat diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif.

Jenis-jenis rasio profitabilitas :

1. *Profit Margin On Sales*

Ratio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.

2. *Return On Investment* (hasil pengembalian investasi)

ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

3. *Return On Equity* (hasil pengembalian ekuitas)

ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

4. *Earning Per Share of Common Stock* (laba per lembar saham biasa)

Rasio laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.

3) Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2012 : 165), rasio solvabilitas (*leverage ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang.

Jenis-jenis rasio solvabilitas :

1. Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva

Rasio modal sendiri dengan aktiva merupakan rasio yang menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor.

2. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap

Rasio modal sendiri dengan total aktiva tetap merupakan rasio yang dilakukan dengan membandingkan modal sendiri perusahaan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

3. Rasio Aktiva Tetap dengan Hutang Tetap

Rasio aktiva tetap dengan hutang tetap merupakan rasio yang dilakukan untuk mengukur tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur jangka panjang.

4. Nilai Buku Saham

Nilai buku per lembar saham dilakukan untuk menunjukkan jumlah rupiah yang akan dibayarkan kepada setiap lembar saham.

4) Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2012 : 172) rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

Jenis-jenis rasio aktivitas :

1. Perputaran Piutang (*Receivable Turn Over*)

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang berputar dalam satu periode.

2. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

Perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (*inventory*) berputar dalam satu periode.

3. Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turn Over*)

Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode tertentu.

4. *Fixed Assets Turn Over*

Fixed assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.

5. *Total Assets Turn Over* (TATO)

Total assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

Adapun penilaian aspek keuangan yang diukur berdasarkan standar Kementrian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1.
Penilaian Kinerja Keuangan
Berdasarkan Standar Kementrian Badan
Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002

Rasio Keuangan	Standar BUMN
ROE	20
ROI	15
Rasio Kas	5
Rasio Lancar	5
<i>Collection Periods (CP)</i>	5
Perputaran Persediaan	5
Perputaran <i>Total Asset</i>	5
Rasio Modal Sendiri Terhadap <i>Total Asset</i>	10
Total Skor	70

2. Good Corporate Governance

a. Pengertian dan Konsep Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Istilah tata kelola perusahaan di Indonesia merupakan dari *Corporate Governance*. Kata *Governance* berasal dari perancis kuno yaitu *Governance* yang berarti pengendalian (*control*) atau *regulated* dan dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang berada dalam kondisi yang terkendali (Subroto, 2005).

Istilah *Good Corporate Governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Codbury Commitee di tahun 1993 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Codbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandara (2008. Hal, 24-25) sebagai :

“Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktor, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.”

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000 : Shaw, 2003).

Stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholders*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai

“agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri.

Good Corporate Governance merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus akan menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan dan lain sebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat seiring banyak bermunculan masalah skandal keuangan dilingkungan bisnis. Konsep GCG telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat *control* dan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Definisi GCG menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses atau struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sehubungan dengan titik berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar penerapan GCG, yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN karena digantikan dengan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi GCG berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Muh. Arief Effendi (2009) menyatakan bahwa :

“GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan *asset* perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.”

Wardhani (2006), menyatakan bahwa “*corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan”. Isu mengenai *corporate governance* ini mulai mengemuka, khususnya di Indonesia setelah Indonesia mengalami masa kritis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan diperhatikan yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. *Corporate governance* biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari Dewan Direksi, Pemegang Saham Institusional, dan Pengendalian dari Mekanisme Pasar. Menurut I Nyoman Tjager (2003 : 2008) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.

b. Teori Good Corporate Governance

1) Teori Agensi (*Agency Theory*)

Konsep GCG timbul berkaitan dengan *principal agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agent*-nya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut dikelola dengan baik

sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Teori agensi menekankan pentingnya perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (*agent*) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2011).

Pemisahan dalam pengelolaan perusahaan dari pemiliknya diajukan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Tugas para *agent* adalah sesuai fungsi yang telah ditetapkan.

“Keleluasaan manajemen dalam mengelola dana guna mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan bisa mengarah pada memaksimalkan tambahan ekonomis bagi kepentingan pribadi (kepentingan para *agent*) dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga dalam menyajikan laporan atas penggunaan dan pengelolaan dana oleh para *agent* tidak melaporkan informasi keuangan perusahaan sesuai dengan yang sebenarnya” (Ernawan, 2011).

Dengan kata lain, para *agent* merekayasa laporan keuangan perusahaan guna menghindari risiko ditemukannya *fraud* yang dilakukan. Disamping itu, kinerja manajemen yang diukur dari keberhasilannya dalam memaksimalkan laba perusahaan, mendorong para *agent* untuk melakukan *earnings management* dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan dinilai baik oleh para pemegang saham. Teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep GCG dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana GCG diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para *agent*. GCG

memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para *agent* bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan.

2) Teori *Stakeholders*

Pengertian *stakeholders* atau para pemangku kepentingan menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan BUMN karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan BUMN. Perusahaan tidak hanya memandang bahwa *stakeholders* adalah investor dan kreditor saja, melainkan pemerintah, pelanggan, pemasok, karyawan (tenaga kerja), masyarakat dan lingkungan.

“Pemerintah dapat dikatakan sebagai *stakeholders* bagi perusahaan karena pemerintah mempunyai kepentingan atas aktivitas perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bisnis” (Sarwako, 2003).

Pihak yang paling penting dalam menjalankan pengelolaan perusahaan adalah masyarakat dan lingkungan, dimana perusahaan dituntut dapat memberi pekerjaan yang produktif dan sehat dalam masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam teori ini menunjukkan adanya peran penting *stakeholders*

dalam perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mampu memberikan kepuasan terhadap *stakeholders*, dimana perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi semua tuntutan *stakeholders* agar dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

3) *Stewardship Theory*

Stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam tuntutan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya.

c. Prinsip-prinsip GCG

Menurut KNKG (2009), Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1) Transparansi (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut untuk mampu menyediakan informasi yang penting atau *materil* dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, *comparable* dan mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders* karena keyakinan dan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan *audit* yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

Disamping itu, perusahaan diharapkan mempublikasikan laporan keuangan dan informasi agar investor mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Selain laporan keuangan, perusahaan menyediakan informasi-informasi penting lainnya dan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada *stakeholders*, khususnya para pemegang saham. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (*transparency*), tanpa rekayasa oleh pihak manapun.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari *agency problem* yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara Pemegang Saham dan Direksi. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan aggaran dasar, etika bisnis, dan pedoman perilaku perusahaan.

Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu sistem pengendalian *internal* (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) untuk mendorong semua organ perusahaan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Dengan perusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggungjawab kepada lingkungan dan masyarakat maka kesinambungan usaha dalam jangka panjang akan terwujud dan perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai *Good Corporate Citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Dalam hal ini, perusahaan dikelola secara *independent*, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari

conflict of interest dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Dalam hal ini pula, setiap organ perusahaan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan, tidak mendominasi atau melempar tanggungjawab satu sama lain sehingga kejelasan tugas dan tanggungjawab dapat terlihat. Untuk mewujudkan prinsip ini dapat ditempuh dengan penetapan *job description* secara jelas dan memastikan setiap organ telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik sesuai apa yang telah ditentukan.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dapat dipastikan semua investor pasti membutuhkan jaminan bahwa setiap *asset* atau *capital* yang mereka tanamkan dikelola secara aman. Untuk itu perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara *fair*, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya praktek korporasi yang merugikan seperti *fraud*, *insider trading* dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan prinsip ini, dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a) Dalam pengambilan keputusan perusahaan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan kesempatan menyampaikan saran, masukan serta pendapat.
- b) Membuat peraturan untuk melindungi kepentingan saham minoritas dalam perusahaan.

- c) Menetapkan secara jelas peran, fungsi dan tanggungjawab semua organ perusahaan.
- d) Menyampaikan informasi penting secara terbuka dan secara wajar.
- e) Memberikan perlakuan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara *professional*.

d. Faktor Keberhasilan Penerapan GCG

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
- 5) Dukungan dari pihak *stakeholders*.
- 6) Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

e. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-prinsip GCG

Pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain :

- 1) Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN agar BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan BUMN dapat tercapai.
- 2) Agar BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara *professional, transparant*, efisien, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
- 3) Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para *stakeholders* (melindungi hak *stakeholders*).
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- 5) Meningkatkan iklim investasi nasional.

f. Organ Persero

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, organ persero terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris, dan Direksi.

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 75 sampai dengan pasal 91, RUPS merupakan sebuah forum dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai perusahaan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Informasi-informasi itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perusahaan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Dalam forum RUPS, para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda rapat, kecuali RUPS itu dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat. RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan. Selanjutnya Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja para Pemegang Saham/Menteri. Sebagai sebuah forum, pada prinsipnya RUPS harus diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan itu dilakukan ditempat kedudukan perusahaan atau ditempat perusahaan melakukan kegiatan operasional. Selain ditempat perusahaan, RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media

elektronik, misalnya media telekonferensi atau video konferensi. Semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi didalam rapat. Meskipun sifatnya telekonferensi, RUPS itu juga harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani oleh semua peserta rapat.

Jenis RUPS terdiri dari :

- a) RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari Laporan Tahunan Perseroan.
- b) RUPS lainnya adalah RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan.

Pemegang saham dapat mengambil keputusan diluar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan keputusan menandatangani keputusan yang dimaksud. Keputusan pemegang saham ini mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik. Keputusan pemegang saham diluar RUPS dapat dilakukan dalam bentuk keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai keputusan RUPS/Menteri.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, hak-hak pemegang saham antara lain :

- a) Mendapatkan perlakuan yang sama (setara) antar pemegang saham.
- b) Menghadiri dan mempunyai hak mengemukakan pendapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c) Mendapatkan informasi-informasi yang penting berkaitan dengan BUMN secara tepat waktu, terukur dan teratur.

Informasi tersebut antara lain :

- (1) Panggilan untuk RUPS.
 - (2) Informasi laporan metode perhitungan, penentuan serta rincian atas gaji, honorarium, fasilitas, dan tunjangan.
 - (3) Informasi mengenai Rencana Kerja Perusahaan dan Anggaran Perusahaan.
 - (4) Informasi keuangan perusahaan.
 - (5) Informasi yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- d) Menerima dividen sesuai dengan komposisi modal yang ditanamkan.
 - e) Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

2) Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor :

PER-01/MBU/2011 pasal 12, diatur mengenai fungsi Dewan Komisaris, antara lain :

- a) Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- b) Menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kepentingan BUMN.
- c) Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- d) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
- e) Memantau dan memastikan implementasi GCG dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
- f) Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam suatu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.

3) Dewan Direksi (*Board Of Director/BOD*)

Tugas dan fungsi utama Dewan Direksi menjalankan dan melaksanakan pengurusan perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola dan dimanage oleh Direksi (Harahap, 2009).

g. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan, maka Komisaris dapat meminta saran, nasihat, pendapat pihak ketiga atau membentuk komite khusus. Komite tersebut antara lain :

1) Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Ketua Komite Audit bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan berkala. Menurut KNKG (2006), Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memastikan :

- a) Laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan transparan.
- b) Dalam melaksanakan audit (eksternal maupun internal) telah dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku.
- c) Pengendalian perusahaan telah dilaksanakan dengan maksimal.
- d) Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- e) Menindaklanjuti temuan audit yang dilakukan oleh manajemen.

2) Komite Nominasi

Komite nominasi bertugas menyusun kriteria pemilihan dan penilaian kinerja Komisaris dan Direksi (Effendi, 2009). Tanggung jawab Komite Nominasi mencakup :

- a) Pengkajian kompetensi calon Anggota Direksi dan Komisaris untuk posisi yang dimaksud.
- b) Pengkajian rencana suksesi.
- c) Evaluasi kinerja Komisaris dan Direksi.
- d) Pengusulan, menilai, dan memberikan rekomendasi atas calon-calon Direksi dan Komisaris BUMN.

3) Komite Remunerasi

Komite ini bertugas membantu Komisaris dalam menentukan jumlah kompensasi bagi Direksi dan dalam mengevaluasi mekanisme pelaksanaannya (Effendi, 2009). Tanggung jawab Komite Remunerasi antara lain :

- a) Menyusun kebijakan penggajian, intensif Direksi dan Komisaris.
- b) Memastikan jumlah dan komposisi yang layak dan wajar dari remunerasi di perusahaan.

4) Komite Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, dalam setiap mengambil tindakan dan keputusan, Direksi harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Atas hal tersebut Direksi wajib melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan GCG. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan bentuk unit kerja yang ada dibawah Direksi atau

memberi penugasan unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.

Kewenangan dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain :

- a) Memberikan saran, masukan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman manajemen risiko dan menerapkannya.
- b) Mensosialisasikan kebijakan, strategi, dan pedoman manajemen risiko ke seluruh *stakeholders*.
- c) Melaksanakan evaluasi atas kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko.

h. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan merupakan elemen penting dalam perusahaan yang mendukung keberhasilan implementasi GCG, hal tersebut disebabkan sekretaris perusahaan merupakan pihak penting bagi perusahaan dalam berhadapan dengan pihak ketiga (Effendi, 2009).

Dalam hal ini, sekretaris perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka yang berkaitan dengan perusahaan kepada *stakeholders*. Sekretaris perusahaan diangkat dengan kualifikasi profesionalisme yang memadai dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kinerja sekretaris perusahaan diawasi dan dievaluasi oleh Dewan Direksi.

Mengaku pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, fungsi sekretaris perusahaan adalah:

- 1) Memastikan BUMN dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 2) Memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi apabila dibutuhkan.
- 3) Sebagai penghubung antara perusahaan dan pemangku kepentingan.
- 4) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan.

i. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, mewajibkan BUMN melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan :

1) Penilaian (*Assessment*)

Penilaian (*assessment*) adalah program untuk mengidentifikasi implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala tiap 2 (dua) tahun. Sebelum melakukan penilaian didahului dengan mensosialisasikan GCG pada semua lapisan BUMN.

Penilaian dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang ditunjuk oleh

Direksi secara langsung. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

2) Evaluasi (*Review*)

Evaluasi (*review*) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas perbaikan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BUMN itu sendiri (*self assessment*). Dalam pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilai independen atau jasa instansi pemerintah tidak dapat menjadi penilai tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang diterapkan sekretaris kementerian BUMN. Hasil evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Tabel II. 2
Penilaian Skor GCG Berdasarkan Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN NO : SK-16/S.MBU/2012.

Skor Penilaian	Predikat
Diatas 85	Sangat Baik
75-85	Baik
60-75	Cukup Baik
50-60	Kurang Baik
Dibawah 50	Tidak Baik

Sumber : Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No : SK-16/S.MBU/2012.

3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang diambil dari beberapa referensi yaitu sebagai berikut :

Tabel II. 3
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
Wika Agustina Harahap (2016)	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> dalam meningkatkan Kinerja Keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan pada Tahun 2010-2014	GCG, Kinerja Keuangan diukur dengan rasio keuangan yang ditetapkan standar BUMN	Pengukuran skor GCG sebagai alat dalam mengukur kinerja keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menunjukkan keadaan yang tidak sejalan, dimana skor GCG mengalami peningkatan belum tentu kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik.	Skripsi
Edi Purnomo (2012)	Pengaruh Good Coporate Governance terhadap Kinerja Keuangan	GCG, Kinerja Keuangan diukur dengan ROE, Leverage, Total Aset Turnover dan Likuiditas (Current Ratio)	Corporate Governance terhadap Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan kegiatan operasional perusahaan, maka semakin meningkat kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.	Jurnal
Tria Wijayanti (2012)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Deviden Dengan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Sebagai Variabel Intervening	Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, <i>Goog Corporate Governance</i> dan Deviden Payout Ratio (DPR)	Rasio Likuiditas yang diporeksi dengan <i>Current Ratio</i> (CR) disimpulkan mempunyai pengaruh signifikan negative sedangkan likuiditas yang proksi dengan <i>cash ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>good corporate governance</i> (GCG)	Jurnal
Nadia Guchi (2016)	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja	<i>Good Corporate Governance</i> , Kinerja Keuangan	Penerapan GCG untuk menilai kinerja perusahaan belum tentu dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan	Skripsi

	Keuangan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Pada Tahun 2011-2014		secara keseluruhan. Terbukti dengan penilaian terhadap GCG yang diukur dengan perolehan skor yang meningkat tidak diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan.	
--	--	--	---	--

B. Kerangka Berpikir

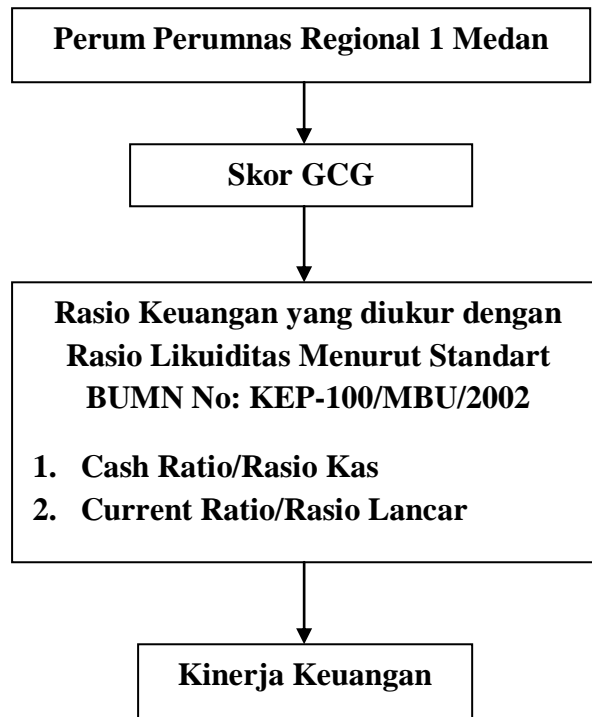
Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar menciptakan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Penerapan GCG yang baik berdampak pada Kinerja Keuangan. Dengan adanya penerapan GCG diharapkan mampu untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. Penerapan dan pengolahan *corporate governance* juga mewujudkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Secara teoritis, pelaksanaan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatnya kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan Investor (Tjager, et al., 2003).

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan Standar Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu *Return On Equity*, *Return On Investment*, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Period*, Perputaran Persediaan, *Total Asset Turn Over*, dan Total Modal Sendiri terhadap Total Aktiva.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan *corporate governance* dengan rasio likuiditas, seperti pada penelitian Edi Purnomo (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh antara *corporate governance* terhadap rasio likuiditas. Dalam penelitian ini GCG diukur berdasarkan skor capaian GCG dan Kinerja Keuangan yang diukur dengan menggunakan Standar Kementerian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002 dengan rasio likuiditas yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar II.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Perum Perumnas Regional I Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan. Adapun definisi dari variabel penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar menciptakan kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Pengukuran untuk tingkat *Good Corporate Governance* dilakukan dengan skor persentase *Good Corporate Governance* yang dilihat dari *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.

Untuk menganalisis penerapan *good corporate governance*, digunakan wawancara dengan indikator pertanyaan sebagai berikut :

Tabel III.1
Indikator Wawancara GCG

No	Variabel	Dimensi	Indikator	No. Pertanyaan
1	Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan.	Prinsip-prinsip GCG.	1. Transparansi	1
			2. Akuntabilitas	2
			3. Responsibilitas	3
			4. Independensi	4
			5. Kesetaraan & Kewajaran	5

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelolah keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang lain. Kinerja keuangan dapat diukur berdasarkan Kementrian Badan Usaha Milik Negara No : KEP-100/MBU/2002 :

- a. *Cash Ratio* = Kas dan Setara Kas / Hutang Lancar x 100%
- b. *Current Ratio* = Aktiva Lancar / Hutang Lancar x 100%

Untuk menganalisis kinerja keuangan maka digunakan wawancara dengan indikator pertanyaan sebagai berikut :

Tabel III.2
Indikator Wawancara Kinerja Keuangan

No	Dimensi	Indikator	No. Pertanyaan
1	Rasio Keuangan	GCG	7,8
		Rasio Likuiditas	6,9

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perumn Perumnas Regional I Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.3
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		November 2017				Juni 2018				September 2018				Oktober 2018				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■														
4	Bimbingan Proposal						■	■	■	■											
5	Seminar Proposal										■										
6	Riset											■	■								
7	Penyusunan Skripsi														■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka bukan berbentuk kalimat, seperti laporan keuangan yaitu laba rugi dan neraca serta laporan capaian Skor GCG pada Perumn Perumnas Regional I Medan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer, merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu hasil wawancara yang dilakukan oleh pegawai/karyawan perusahaan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Perum Perumnas Regional I Medan berupa data laporan keuangan baik laporan laba rugi maupun neraca serta laporan capaian Skor GCG.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi dokumentasi terhadap sumber penelitian, yaitu yang dilakukan dengan memperoleh laporan keuangan perusahaan.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang di Perumn Perumnas Regional I Medan untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Tabel III.4
Daftar Wawancara
Perum Perumnas Regional 1 Medan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Perum Perumnas menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	
2	Apakah Perum Perumnas memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaeran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.	
3	Bagaimana perusahaan melaksanakan tanggung jawab social terhadap masyarakat.	
4	Apakah masing-masing organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	
5	Apakah Perum Perumnas memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, dan kondisi fisik.	
6	Apakah Kinerja Keuangan Perum Perumnas sudah mengikuti standart BUMN.	
7	Apakah Perum Perumnas sudah menerapkan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .	
8	Mengapa setelah diterapkan GCG kinerja keuangan perusahaan masih berada dibawah Standart BUMN.	
9	Mengapa setelah diterapkan GCG kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas masih berada dibawah Standart BUMN.	

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menghasilkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Menghitung dan menganalisis kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas yang terdiri dari *cash ratio*, *current ratio*.
2. Menganalisis penerapan GCG pada Perumn Perumnas Regional I Medan.
3. Menganalisis GCG dalam meningkatkan rasio likuiditas yang terdiri dari *cash ratio* dan *current ratio* Perum Perumnas.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

PERUMNAS adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbentuk Perusahaan Umum (Perum) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Umum. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah kebawah. Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2004 Tanggal 10 Mei 2004. Sejak didirikan Tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan sebagai pioner dalam penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Sebagai BUMN pengembang dengan jangkauan usaha Nasional, Perumnas mempunyai 7 Wilayah Usaha Regional I sampai VII dan Regional Rusunawa. Helvetia Medan, Ilir Barat Palembang, Banyumanik Semarang, Tamalanrea Makasar, Dukuh Menanggal Surabaya, Antapani Bandung adalah contoh Pemukiman skala besar yang pembangunannya dirintis Perumnas. Kawasan pemukiman tersebut kini telah berkembang menjadi “Kota Baru” yang prospektif. Selain itu, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi juga merupakan “Kota Baru” yang dirintis Perumnas dan kini berkembang pesat menjadi kawasan strategis yang berfungsi sebagai penyangga Ibu Kota.

Dalam menganalisis rasio likuiditas yang di ukur dengan rasio *current ratio* dan *cash ratio* dalam meningkatkan *Good Corporate Governance* penulis menggunakan laporan keuangan berupa laporan Neraca dan laporan Laba Rugi Perum Perumnas Regional I Medan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013- 2017.

Berdasarkan laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi pada Perum Perumnas Regional I Medan selama tahun 2013-2017 yang digunakan sebagai dasar perhitungan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan Perum Perumnas Regional I Medan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu Likuiditas yang diukur dengan *Current Ratio* dan *Cash Ratio*.

Berikut adalah perhitungan kinerja keuangan Perum Perumnas Regional I Medan dengan Likuiditas serta penilaian *Corporate Governance* yang diperoleh oleh perusahaan selama 5 tahun dengan tahapan- tahapan perhitungan sebagai berikut:

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 dengan hanya menggunakan dua rasio dari delapan rasio yang seharusnya yaitu Rasio Lancar (*current ratio*) dan Rasio Kas (*cash ratio*) yang ada di rasio likuiditas.

1) Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menurut Fred Weston dalam Kasmir (2012 : 129) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila ditagih, perusahaan akan mampu memenuhi utang tersebut terutama utang yang telah jatuh tempo, baik

kewajiban pada pihak luar perusahaan maupun didalam perusahaan berikut adalah jenis-jenis rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. *Current Ratio*

Current Ratio merupakan Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Berikut adalah rumus *Current Ratio* dan hasil perhitungan nilai *current ratio* yang diperoleh oleh Perum Perumnas Regional I Medan selama tahun 2013 2017.

Rumus *Current Ratio* :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel IV.1
Perhitungan *Current Ratio*
Perumn Perumnas Regional I Medan

Tahun	Aktiva Lancar (Rupiah)	Hutang Lancar (Rupiah)	<i>Current Ratio</i>	Standart BUMN
2013	178.863.929.990	71.801.118.847	249,11%	>125%
2014	179.126.014.130	73.507.268.847	243,69%	
2015	178.968.252.498	39.747.688.810	450,26%	
2016	182.253.652.047	54.345.750.702	335,30%	
2017	412.322.607.388	151.605.632.762	271,97%	

Sumber : Laporan Keuangan Perum Perumnas Regional I Medan

$$2013 = \frac{178.863.929.990}{71.801.118.847} \times 100\% = 249,11$$

$$2014 = \frac{179.126.014.130}{73.507.268.847} \times 100\% = 243,69$$

$$2015 = \frac{178.968.252.498}{39.747.688.810} \times 100\% = 450,26$$

$$2016 = \frac{182.253.652.047}{54.345.750.702} \times 100\% = 335,30$$

$$2017 = \frac{412.322.607.388}{151.605.632.762} \times 100\% = 271,97$$

1. 2013 – 2014

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa current ratio untuk tahun 2013 sebesar 249,11 ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi 243,69. Penurunan yang terjadi pada tahun 2014 dikarenakan hutang yang bertambah dimana kas pada tahun 2013 sebesar Rp. 178.863.929.990 dan kas pada tahun 2014 Rp. 179.126.014.130 sedangkan hutang usaha tahun 2013 Rp. 71.801.118.847 dan mengalami kenaikan hutang usaha pada tahun 2014 sebesar Rp. 73.507.268.847. Dalam hal ini pada tahun 2013 berarti 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan sebesar 249,11%, berarti perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio lancarnya.

2. 2014 – 2015

Pada tahun 2015 current ratio mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 206,57% dimana diketahui current ratio pada tahun 2014 sebesar 249,11% dan pada tahun 2015 sebesar 450,26%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena perumnas telah mampu membayar hutang usaha dari kas yang dimiliki. Dalam hal ini pada tahun 2014 berarti 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan sebesar 243,69%, berarti perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio lancarnya, begitu juga untuk tahun 2015 hutang lancar yang dijamin oleh perusahaan sebesar 450.26%

dari 100%. Berarti perusahaan telah mampu membayar kewajiban jangka pendeknya melalui rasio lancar.

3. 2015 – 2016

Pada tahun 2016 current ratio kembali mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 114,96% dari tahun 2015 sebesar 450,26% dan pada tahun 2016 sebesar 335,30%. Hal ini disebabkan karena hutang lancar bertambah pada tahun 2016 sebesar Rp.54.345.750.702 dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp. 39.747.688.810. Dalam hal ini pada tahun 2016 berarti 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan sebesar 335,30%, berarti perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio lancarnya.

4. 2016 – 2017

Pada tahun 2017 current ratio kembali mengalami penurunan yang tidak terlalu besar yaitu 63,33% dari tahun 2016 sebesar 335,30% dan pada tahun 2017 yaitu 271,97%. Hal ini dikarenakan bertambahnya hutang lancar yang terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 151.605.632.762 dan pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 54.345.750.702. Dalam hal ini pada tahun 2013 berarti 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan sebesar 271,97%, berarti perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio lancarnya.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai *Current Ratio* yang diperoleh oleh Perum Perumnas Regional I Medan tahun 2013-2017 telah mencapai standart yang ditetapkan oleh BUMN yaitu sebesar 125%.

b. Cash Ratio

Cash Ratio merupakan alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan jumlah kas yang dimiliki.

Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas yang dapat ditarik setiap saat. Berikut adalah rumus dari *Cash Ratio* yang diperoleh oleh Perum Perumnas Regional I medan selama tahun 2013-2017.

Rumus *Cash Ratio* :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas Dan Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel IV.2
Perhitungan *Cash Ratio*
Perum Perumnas Regional I Medan

Tahun	Kas + Setara Kas	Hutang Lancar	<i>Cash Ratio</i>	Standart BUMN
2013	17.321.003.188	71.801.118.847	24,12%	>35%
2014	17.290.543.188	73.507.268.847	23,52%	
2015	38.830.701.723	39.747.688.810	97,69%	
2016	1.789.276.388	54.345.750.702	3,29%	
2017	5.855.669.411	151.605.632.762	3,86%	

Sumber : Laporan Keuangan Perum Perumnas Regional I Medan

$$2013 = \frac{17.321.003.188}{71.801.118.847} \times 100\% = 24,12$$

$$2014 = \frac{17.290.543.188}{72.507.268.847} \times 100\% = 23,52$$

$$2015 = \frac{38.830.701.723}{39.747.688.810} \times 100\% = 97,69$$

$$2016 = \frac{1.789.276.388}{54.345.750.702} \times 100\% = 3,29$$

$$2017 = \frac{5.855.669.411}{151.605.632.762} \times 100\% = 3,86$$

1. 2013 – 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa cash ratio pada tahun 2013 sebesar 24,12% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 23,52%. Terjadinya penurunan ditahun 2014 disebabkan karena hutang lancar di tahun 2014 meningkat sebesar Rp.73.507.268.847 dibandingkan tahun 2013 hanya

sebesar Rp. 71.801.118.847. kas dan setara kas pada tahun 2013 sebesar Rp. 17.321.003.188 dan menurun pada tahun 2014 yaitu hanya Rp.17.290.543.188. Dalam hal ini pada tahun 2013 berarti 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan hanya sebesar 24,12%, berarti perusahaan belum mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio kasnya.

2. 2014 – 2015

Pada tahun 2015 cash ratio mengalami peningkatan yang sangat drastis dimana diketahui cash ratio pada tahun 2014 yaitu 23,52% dan pada tahun 2015 menjadi 97,69%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 jumlah kas dan setara kas mengalami kenaikan ketimbang pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini pada tahun 2014 berarti 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan hanya sebesar 23,52%, berarti perusahaan belum mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio kasnya. Akan tetapi untuk tahun 2015 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan sebesar 97,69%, berarti perusahaan mampu dalam pembayaran kewajiban jangka pendek melalui rasio kas.

3. 2015 – 2016

Ditahun 2016 cash ratio juga mengalami penurunan dimana cash ratio pada tahun 2015 sebesar 97,69% dan pada tahun 2016 sebesar 3,29%. Hal ini disebabkan karena hutang lancar pada tahun 2016 bertambah sebesar Rp. 54.345.750.702 dibandingkan pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 39.747.688.810. Dalam hal ini pada tahun 2016 berarti 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan hanya sebesar 3,29%, berarti perusahaan belum mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio kasnya.

4. 2016 – 2017

Pada tahun 2017 cash ratio menjadi 3,86% dibandingkan tahun lalu yaitu 3,29%. Hal ini disebabkan karena hutang lancar mengalami lonjakan yang sangat tinggi sebesar Rp. 151.605.632.762 dan pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 54.345.750.702. Dalam hal ini pada tahun 2017 berarti 100% hutang lancar dijamin oleh perusahaan hanya sebesar 3,66%, berarti perusahaan belum mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio kasnya.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cash Ratio* yang diperoleh oleh Perum Perumnas Regional I Medan tahun 2013-2017 hanya pada tahun 2015 mencapai standart BUMN yang telah ditetapkan, namun untuk tahun selanjutnya belum ada yang mencapai standart yang ditetapkan oleh BUMN yaitu sebesar 35%.

3. Perhitungan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder-nya. Berlandaskan peraturan perundangan dan nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002).

Berikut adalah Predikat penilaian Skor *Good Corporate Governance* brdasarkan keputusan sekretaris kementerian BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Penilaian Skor Indeks GCG Berdasarkan Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012

Skor Penilaian	Predikat
Diatas 85	Sangat Baik
75-85	Baik
60-75	Cukup Baik
50-60	Kurang Baik
Dibawah 50	Tidak Baik

Sumber : Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No : SK-16/S.MBU/2012.

Dan berikut adalah Skor Good Corporate Governance yang diperoleh oleh

Perum Perumnas Regional I Medan selama Tahun 2013-2017 :

Tabel IV.4
Hasil Skor *Good Corporate Governance* Perum Perumnas Regional I Medan
Selama tahun 2013-2017

Tahun	Skor GCG	Standar BUMN	Keterangan
2013	83,35%	75-85	Baik
2014	81,52%	75-85	Baik
2015	88,52%	Diatas 85	Sangat Baik
2016	84,62%	75-85	Baik
2017	86,46%	Diatas 85	Sangat Baik

Sumber : *Report Good Corporate Governance* Perum Perumnas Reg 1 Medan

Perhitungan skor Good Corporate Governance dinilai dari Komitmen Penerapan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta aspek lainnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa skor GCG pada tahun 2013 sebesar 83,35% berada di antara 75-85 sesuai standart BUMN dan dapat dikatakan “Baik”, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 81,52% dan masih berada diantara 75-85 dan masih dikatakan “Baik”, untuk tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 88,52% dan berada diatas 85 sesuai standart BUMN dan dapat dikatakan “Sangat Baik”, dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 84,62% dan berada di antara 75-85 sesuai standart

BUMN dan bisa dikatakan “Baik”, serta untuk tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 86,46% dan berada diatas 85 dan dapat dikategorikan dalam keadaan “Sangat Baik”.

Dapat disimpulkan bahwa skor GCG yang diperoleh Perum Perumnas Regional 1 Medan selama tahun 2013-2017 berada diatas standart BUMN dan termasuk kedalam predikat “Sangat Baik”.

B. Pembahasan

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan Rasio Likuiditas pada Perum Perumnas Regional I Medan yang diukur berdasarkan dua dari delapan indikator yang telah dihitung pada sub bab sebelumnya. Dari penilaian setiap indikator yang digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan BUMN dengan menggunakan skor gcg dan rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002 yaitu :

1. Menganalisis Penyebab Menurunnya Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas yang terdiri dari *cash ratio* Perum Perumnas Regional I medan Periode 2013-2017

a. *Cash Ratio*

Perhitungan cash ratio di Perum Perumnas yang dihitung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 secara terus menerus mengalami penurunan yang cukup drastic, hanya pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tahun 2013 perusahaan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan standart BUMN yaitu hanya sebesar 24,12% dari hasil yang seharusnya yaitu 35% hal itu disebabkan karena hutang lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan dengan kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Dan juga untuk

tahun 2014 hutang lancar yang dimiliki perusahaan mengalami peningkatan dan untuk kas dan setara kasnya justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 lalu. Pencapaian cash ratio pada tahun 2014 hanya mencapai 23,52% dibandingkan tahun 2013 sebesar 24,12%. Dan untuk tahun 2015 pencapaian cash ratio menunjukkan hasil peningkatan yang cukup drastis yaitu 97,69% dan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 23,52%. Hal ini disebabkan karena antara kasa dan setara kas terhadap hutang lancar memiliki selisih sedikit sehingga perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut (Kasmir, 2015) ”semakin kecil rasio ini semakin jelek bagi perusahaan, demikian pula sebaliknya”. Untuk tahun 2016 cash ratio kembali mengalami penurunan yang cukup drastic sebesar 3,29% dibandingkan tahun lalu. Dan untuk tahun 2017 cash ratio yang dimiliki perusahaan sebesar 3,86% dan masih jauh dibawah standart BUMN. Penurunan yang terjadi pada cash ratio disebabkan karena Perum Perumnas yang bergerak dibidang infrastruktur yang menjual bangunan dengan cara kredit kurang mampu dalam mengelola setiap asset yang dimiliki dan masih adanya tunggakan yang belum dibayar oleh pihak pembeli sehingga perusahaan belum maksimal dalam mengelola kasnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab rasio ini menurun dan belum memenuhi standar BUMN dikarenakan kurang tersedianya uang kas didalam perusahaan untuk membayar hutang lancarnya dan meningkatnya jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan, serta perusahaan kurang mampu dalam mengelola setiap asset yang dimiliki. Dan cash ratio yang dimiliki perusahaan belum mencapai standart keuangan yang telah ditetapkan perusahaan, dimana standart nya sebesar 35%.

2. Menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* Perum Perumnas Regional I Medan

a. Transparansi (*Transparency*)

Dalam prinsip ini perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, comparable dan mudah diakses serta dipahami oleh stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan.

Dalam hal ini Perum Perumnas menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai serta jelas dan akurat kepada pihak yang berkepentingan yang dapat dilihat dalam bentuk laporan keuangan. Keterbukaan informasi perusahaan ada di situs www.perumnas.co.id. perumnas menyediakan informasi kepada publik untuk setiap aksi korporasi yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya dua hari kerja, termasuk kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris. Informasi yang disajikan perumnas juga meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi, dan laporan tanggungjawab sosial perusahaan yang telah di audit, serta sistem alokasi dana remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prinsip ini perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara

jasas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, serta memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan.

Perumnas menerapkan berbagai aturan perundangan yang berlaku dan berbagai kebijakan dasar pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan regulator dipasar modal yaitu, membentuk Komite Audit yang Independen dan Kompeten sebagai bagian dari penegakan aturan internal dan berjalannya kegiatan operasional sesuai kaidah korporasi yang baik, Dewan Komisaris perumnas membentuk Komite Audit dengan anggota-anggota yang berkompeten dibidangnya, berstatus independen dan mampu bertindak independen. Dan Perum Perumnas juga menerapkan sistem penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, tetapi perusahaan juga memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Dalam prinsip ini perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

Beberapa kebijakan dan praktek operasional yang menunjukkan bahwa perumnas dikelola dan upaya peningkatan kualitas penerapan asas ini seperti,

setiap insan perumnas dituntut menunjukkan tanggungjawabnya dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas tersebut dinilai untuk kemudian dijadikan dasar bagi penetapan jenjang karir dan besaran remunerasi yang akan diterima. Remunerasi berbasis kinerja ini sejalan dengan ketentuan peraturan terbaru dari Kementrian BUMN. Dalam hal ini pelaksanaan tugas telah dibagi sesuai dengan ini tanggung jawab yang telah diberikan serta ikut serta dalam kegiatan social dimasyarakat serta keagamaan, serta membantu memelihara kebersihan lingkungan sekitar.

d. Kemandirian (*Independency*)

Penyusunan dan penerapan *code of conduct* termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Larangan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan hingga derajat tertentu antara para direktur dengan anggota dewan komisaris ataupun antara masing-masing anggota direktur dan dewan komisaris. Dalam hal ini perusahaan dikelola secara independent, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Perum perumnas regional I Medan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Karena setiap perusahaan memiliki auran tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan yang melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Memperlakukan seluruh stakeholder secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh perumnas juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbangsaran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan perusahaan. Kesetaraan dan kewajaran juga diterapkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian dan penetapan jenjang karir para karyawan. Pada keseluruhan proses pengelolaan sumber daya manusia tersebut, perumnas hanya mendasarkan pada kompetensi, kemauan dan kinerja setiap karyawan.

Perum Perumnas membuka kesempatan kerja bagi setiap orang yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak perusahaan tanpa membeda-bedakan suku, agama, serta ras. Karena bagi Perumnas yang dinilai dari seorang calon karyawan adalah kemampuan yang dimiliki.

3. Menganalisis GCG Dalam Meningkatkan Rasio Likuiditas yang terdiri dari cash ratio dan current ratio Pada Perum Perumnas Regional I Medan

Pengukuran skor Good Corporate Governance sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja keuangan pada Perum Perumnas Regional 1 Medan tidak menunjukkan keadaan yang sejalan. Dimana skor GCG yang mengalami peningkatan, tetapi belum tentu dengan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas dalam keadaan baik, hal ini dapat dilihat dari skor GCG yang mengalami peningkatan, tetapi untuk kinerja keuangan masih ada yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peneapan GCG yang baik, belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini bertentangan dengan teori

yang dinyatakan Menurut (Azhar Maksun, 2005) Manfaat dari penerapan GCG adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (I NYoman Tjager, 2003). Tetapi berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama, penerapan GC untuk menilai kinerja perusahaan belum tentu dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Terbukti dengan penilaian terhadap GCG yang diukur dengan perolehan skor GCG yang meningkat tidak diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan (Nadia Guchi, 2016).

4. Wawancara pada Perum Perumnas Regional 1 Medan

Berdasarkan wawancara pada Perum Perumnas Regional 1 Medan maka disini akan dijawab hasil dari wawancara penulis kepada pihak Perum Perumnas.

1. Perum Perumnas menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai serta jelas dan akurat kepada pihak yang berkepentingan yang dapat dilihat dalam bentuk laporan keuangan.
2. Perum Perumnas menerapkan sistem penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, tetapi perusahaan juga memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan.
3. Ikut serta dalam kegiatan social dan keagamaan, serta membantu memelihara kebersihan lingkungan sekitar.
4. Iya. Karena dalam setiap perusahaan memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan yang melakukan tugas masing-masing.
5. Perum Perumnas membuka kesempatan kerja bagi semua orang yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak perusahaan tanpa

membeda-bedakan, suku, agama serta ras. Karena bagi Perum Perumnas yang dinilai dari seorang calon karyawan adalah kemampuannya.

6. Kinerja Keuangan Perum Perumnas sudah mengikuti standart BUMN yang telah ditetapkan KEP-100/MBU/2002
7. Perum Perumnas telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) karena Perum Perumnas adalah Perusahaan BUMN.
8. Karena Rasio Likuiditas yang dihitung dengan cash ratio menurun disebabkan kurang tersedianya kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban lancarnya.
9. Karena cash rasionya menurun dan belum memenuhi standart BUMN. Hal ini dikarenakan kurang tersedianya kas dan setara kas didalam dan peningkatan jumlah hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Rasio Likuiditas dalam meningkatkan GCG pada Perum Perumnas Regional I Medan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Cash Ratio* belum memenuhi standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 35%. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik bagi perusahaan disebabkan menurunnya kas perusahaan dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan. Berarti perusahaan belum mampu dalam membayar hutang jangka pendek atau hutang yang telah jatuh tempo dengan menggunakan kas perusahaan. Hal ini juga disebabkan karena meningkatnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dan tidak dibarengi dengan meningkatnya kas dan setara kas dari perusahaan. Dan perusahaan kurang mampu dalam mengelola asset yang dimiliki serta masih adanya tunggakan kas yang belum diterima dari pembeli. Karena Perum Perumnas bergerak dibidang penjualan rumah/bangunan dalam bentuk kredit.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perum Perumnas menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik dan untuk pelaksanaan prinsip GCG dikatakan sudah sesuai dengan yang diharapkan.
3. *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas yang terdiri dari cash ratio dan current ratio menunjukkan keadaan yang tidak sejalan dimana skor GCG yang diperoleh

mengalami peningkatan akan tetapi rasio likuiditas masih ada yang mengalami penurunan yaitu pada *cash ratio* masih berada dibawah standart BUMN.

B. Saran

Setelah memperhatikan GCG dalam meningkatkan rasio likuiditas Perum Perumnas Regional I Medan yang diukur dengan rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No KEP-100/MBU/2002, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, agar selalu melakukan penilaian dan evaluasi kinerja. Dalam menilai kinerja sebaiknya mempertimbangkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada.
2. Perusahaan sebaiknya dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah indikator-indikator pernyataan masing-masing variabel yang mampu mengarah pada permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bella Novia Rizky (2015). "Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Mitra Tani Dua Tujuh". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Erlina Yukawati (2013). "Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Rakabu Sejahtera di Sragen". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Edi Purnomo (2012). "*Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Dalam CGPI Tahun 2006 sampai 2010)*". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Erni R. Ernawan (2011). *Business Etthics – Etika Bisnis Edisi Revisi*. PT. Alfabeta dan Implementasi, PT. Salemba Empat : Jakarta.
- F. Iflakhul Khamidah (2015). "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas Dan Likuiditas". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Narotama : Bandung. Hal 1-19.
- Harahap, W. Agustina. (2016). *Analisis Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jaya Laksana (2015). "Corporate Governance dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012)". *Ejurnal Akuntansi*, Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 11.1 (2015) : 269-288.
- Kasmir (2012). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri BUMN No : Per-10/MBU/2011. *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik*. Jakarta.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-100/MBU/2002. *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/MBU/2002. *Good Corporate Governance*.
- Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG). *Pedoman Umum Good Corporate (GCG)*. Jakarta.

- M. Arief Effendi (2009). *The Power Of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nadya Gucci (2016). “Analisis GCG dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Pada Tahun 2011-2014”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Raymond Wawondos dan Ronny H. Mustamu (2014). “Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance”. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Agora Vol.2, No.2, (2014).
- Ristifani (2009). “Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Hubungannya Terhadap Kinerja Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, (2009). Hal 1-28.
- Pratiwi Lestari Girsang (2016).”*Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan GCG sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Tjager et.al (2003). *Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT. Prenhallindo : Jakarta.
- Tria Wijayanti (2012). ”*Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen dengan GCG sebagai Variabel Intervening*”. *Jurnal. Manajemen*. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim : Malang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selviana
NPM : 1405170646
Tempat, Tanggal Lahir : CintaJadi, 08 Oktober 1996
Agama : Islam
JenisKelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JalanAlfalaah IV No.16 Kel. Glugur Darat 1 Kec.
Medan Timur
Anak ke : Dua dari Tiga Bersaudara

Nama Orangtua

Ayah : Ahmad
Ibu : Sariyah
Alamat : Lingkungan VI Cinta Jadi Kec. Ujung Padang
Kab.Simalungun

Pendidikan Formal

1. Tahun 2001 – 2002 : TK Ria Sari Tinjowan
2. Tahun 2002 – 2008 : SD Negeri 091709 Afd. II Tinjowan
3. Tahun 2008 – 2011 : SMP Negeri 1 Ujung Padang
4. Tahun 2011 – 2014 : SMA Negeri 1 Ujung Padang
5. Tahun 2014 – 2019 : Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi KONSentrasi Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).